

BAB III

ANALISIS

A. Biografi Singkat H. Ma'wah Masykur

H. Ma'wah Masykur di lahirkan sebuah Kota Kabupaten bernama Lamongan pada, 21 Februari 1936, wafat hari kamis tanggal 14 Tahun 2013 Lamongan Jawa Timur dari pasangan suami Istri yang sangat sederhana akan tetapi taat Beragama Islam.¹¹¹

Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Jawa Timur. H. Ma'wah Masykur tipe orang sederhana dalam keseharian beliau mempunyai Istri bernama Hj. Raihanah selama pernikahan dikeruniai lima orang anak bernama Lily Pudjiastuti, Mahbub Humaidi, Dewi Novianty Azizah, Izzatullaila, dan Elya Hidayanti.¹¹²

Setelah hijrah dari Lamongan Jawa Timur ke Banjarmasin beralamat Jl. Banjar Indah Permai 1. No.51 RT. 64. RW. 006 Kelurahan Pemurus Dalam Banjarmasin.¹¹³

Beliau memang orang yang luas biasa dalam berbagai hal organisasi dan pemeritahan, adapun pendidikan formal dicapai yaitu, Sekolah Rakyat (SR) 6 Tahun, tamat Tahun 1953 di Lamongan, Sekolah Rakyat Islam (SRI) Tahun 1953 di

¹¹¹Nurhudianto Munawar Khalil, *politisi yang teruji oleh waktu*, (50 tahun pengabdian H. Ma'wah Masykur), (Qalam Borneo: Kalimantan Selatan, 2008). hlm. 148.

¹¹²Nurhudianto Munawar Khalil, *Ibid*, hlm. 149.

¹¹³*Ibid*, hlm. 150.

Lamongan , Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 Tahun, tamat Tahun 1956, Madrasah Aliyah Islam Negeri (MAIN) tamat Tahun 1969, mengikuti Pendidikan Ilmu Hukum di Jakarta (Berijazah).¹¹⁴

Selain itu H. Ma'wah Masykur menjalani Pendidikan Informal yakni, kursus - kursus yang di gelar Pemprov Kalsel dengan Instruktur dari Pusat, beberapa pelatihan di Diklat Depdagri di Jakarta, beberapa Diklat wawasan kebangsaan di Dephankam di Jakarta, beberapa kali mengikuti pelatihan pendalaman setiap lahirnya Peraturan dan Perundangan-Undangan yang baru.¹¹⁵ Bukan hanya itu saja pengalaman yang diraih ada juga organisasi organisasi masyarakat yakni, Ketua Departemen Penerangan GP Ansor, Anak Cabang Lamongan pada Tahun 1953-1956, Ketua umum Pelajar Islam Indonesia (PII), Cabang Kabupaten Lamongan pada Tahun 1953-1956, keluarga besar PII Kalsel pada Tahun 1956, Ketua Cabang GP Ansor Kec. Labuan Selatan Kab. HST pada Tahun 1956-1960, Ketua Pesatuan Guru NU Kab. HST pada Tahun 1956-1960, Ketua Koordinator GP Ansor Kab. HST pada Tahun 1960-1970, Ketua PW Nahdatul Ulama Kalimantan Selatan pada Tahun 1970-1976, Anggota Badan Penasehat Dewan Dakwah Islam Indonesia Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.¹¹⁶

Pengalaman H. Ma'wah Masykur dalam Partai Politik hal tidak pernah terbantahkan yakni, Ketua PD Partai NU Kab. HST pada Tahun 1960-1970, Ketua

¹¹⁴*Ibid*, hlm. 134.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 150.

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 151.

Koordinator Partai Persatuan Pembangunan Kab. HST pada Tahun 1970-1976, Wakil Ketua DPW Kalimantan Selatan pada Tahun 1976-1978, wakil ketua DPW PPP Kalimantan Selatan 1978 -1984, Wakil Ketua DPW Parta Politik Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan pada Tahun 1984-1997, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PPP Kalsel, Wakil Ketua Pimpinan Harian Wilayah PPP Kalsel.¹¹⁷

H. Ma'wah Masykur pengalaman Pekerjaan non Parlemen yaitu, Sekretaris Yayasan (Pembentuk Budi) Haruyan Kab. HST pada Tahun 1956-1966, guru agama Honorer Pemerintah di beberapa Madrasah di Kab. HST pada 1967, PNS guru pada Tahun 1967, Komisariss PT Kalimantan Konstruksi Kalimantan Selatan.¹¹⁸

H. Ma'wah Masykur memang pengabdian Parlemen luar biasa di Kalimantan Selatan selama 50 Tahun yakni, Ketua DPRD GR Kab. HST pada Tahun 1967-1971, Anggota DPRD Kab. HST pada Tahun 1971-1977, Anggota DPRD Kalimantan Selatan pada Tahun 1977-1982, Anggota DPRD Kalimantan Selatan pada Tahun 1982-1987, Anggota DPRD Kalimantan Selatan pada Tahun 1987-1992, Calon Anggota DPR RI pada Tahun 1992-1997, Anggota DPRD Kalimantan Selatan pada Tahun 1997-2004, dan Wakil Ketua DPRD Kalimantan pada Tahun 2004-2009.¹¹⁹

¹¹⁷*Ibid*, hlm. 151.

¹¹⁸*Ibid*, hlm. 152.

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 153-154.

B. Pengabdian dan Karya- Karya H. Ma'wah Masykur

H. Ma'wah Masykur merupakan orang yang suka berdiskusi bersama Ulama dan guru-guru madrasah sebagai pendidik di Haruyan Hulu Sungai Tengah Barabai, setelah berapa lama bertempat tinggal di Haruyan tentu di kenal masyarakat luas bagi warga Barabai bahkan di Kalimantan Selatan.¹²⁰

H. Ma'wah Masykur aktif Gerakan Pemuda Ansor dan NU, setiap bulan sekali mengadakan rapat bersama guru-guru di madrasah sekaligus beliau diamanahi sebagai kepala sekolah pada Tahun 1957-1958, sekolah yang beliau bangun hampir tidak mampu menampung murid baru dan saat ini atas usul dari tokoh NU H.Tugampal agar murid baru pindah Sekolah Rakyat (SR) yang H. wa'wah Masykur pimpin seligus sebagai pimpinan dan kepala sekolah anak-anak yatim di Haruyan berjumlah 60 orang, adapun hasil dari pengabdian beliau sebagai berikut, membangun Kantor NU, Sekolah Rakyat (SR), MTsNU, dan kantor organisasi kepemudaan di Barabai.¹²¹ Oleh karena itu H. Ma'wah Masykur terkesan bagi jamaah melakukan dakwah bersama guru-guru yang lainnya, mendirikan satu seni drama Islam dengan nama Nurul Islam yang mementaskan pahlawan-pahlawan Islam zaman jahiliyah, fir'aun dan Sahabat Nabi Muhammad SAW, berjudul Fir'aun di dalam seorang wanita teguh memegang iman. Hal ini dapat di apresiasi oleh pihak pemerintah Hulu Sungai Tengah dan tokoh Ulama, selain itu juga H. Ma'wah

¹²⁰*Ibid*, hlm. 45.

¹²¹*Ibid*, hlm. 46-48.

Masykur menjadi Komandan Kompi 9 Hansip Batalyon 2 mei baris-baris khusus guru-guru untuk keperluan ganyang Malaysia, serangkum pengalam itulah akhirnya turut mewarnai perjalanan Politik.¹²²

C. Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur

Agama memang bersifat Universal secara spontan tidak ada aturan tentang bagaimana sebuah bentuk Negara, Konsep politik yang baik dan bagaimana Politik tersebut sesuai dengan syariat agama Islam, menurut H. Ma'wah Masykur, manusia sebagai makhluk sosial diciptakan Allah dalam keadaan lemah, karena secara individual manusia tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di samping itu, perbedaan individualitas, seperti perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami dan kemampuan, semuanya itu mendorong manusia untuk bersatu, bekerja sama dan saling membantu. Dari proses interaksi sosial itu secara evolusi membentuk komunitas hidup bermasyarakat, juga lahir kota-kota dan akhirnya sepakat mendirikan negara. Dengan kata lain, sebab lahirnya negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama dalam suatu ikatan kerjasama yang sehat dan saling menguntungkan. Negara dapat dipahami sebagai lembaga Politik yang merupakan manifestasi dari kebersamaan dan keberserikatan

¹²²*Ibid*, hlm. 50.

sekelompok manusia untuk mewujudkan kebaikan dan¹²³ kesejahteraan bersama. Beliau menjelaskan bahwa dari segi Politik tata negara, pemenuhan kebutuhan bersama itu memerlukan aturan Hukum sebagai ikatan moral bagaimana proses kerjasama untuk saling membantu itu berjalan etis dan sehat. Apabila kita kaji lebih mendalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw yang berbicara tentang Politik seperti ketaatan kepada pemimpin, kepemimpinan, musyawarah dan sebagainya, dijelaskan dalam Q.S.Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

”hai orang-orang yang beriman, taaatilah Allah, dan taatilah Rasul -Nya dan Ulil Amri di antara kamu” (Q.S.Surah An-Nissa;59).¹²⁴

Secara spesifik dalam buku lain juga dijelaskan hal tersebut bagaimana pentingnya mentaati seorang pemimpin,yaitu:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Swt. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”(Q.S.An-Nisa:80).¹²⁵

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir menjelaskan, beliau menjelaskan, barangsiapa mematuhi rasul berarti telah mematuhi Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah tidak memerintahkan dan melarang sesuatu, kecuali sesuai dengan perintahnya dan

¹²³Somad Z. Dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2004). hlm .140.

¹²⁴Tim Penterjemah Departement Agama RI,Al- Qur'an dan Terjemah. 2009. Hlm. 129.

¹²⁵Muhibbin, M.A, *Hadis-hadis politik*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1996). Hlm. 23.

larangan-Nya. Oleh karena itu, orang yang menaati Rasulullah saw. Dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, berarti juga menaati Allah. Sedangkan orang yang tidak mematuhi, Muhammad, ketahuilah bahwa Kami mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, bukan untuk menguasai dan memelihara amal perbuatan mereka, yang merupakan tanggung jawab Kami, bukan tanggung jawabmu.¹²⁶

Pemerintah tentu mempunyai tanggung jawab menjamin hak-hak warga negara meliputi segala aspek kehidupan lebih khusus tiga lembaga yaitu, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Quis ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan, ayat ini mengandung taat Allah dan Rasulnya, dan taat kepada pemegang Kekuasaan diantara manusia serta bila ada perselisihan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya.¹²⁷ Kemudian dalam Hadist Nabi yang berhubungan dengan Politik, Nabi Muhammad S AW bersabda:

Imam Nawawi dalam Kitab Riyadhus Sholihin, beliau menjelaskan, wajib taat kepada Pemimpin kaum muslimin selain dalam hal maksiat dan haram taat pada Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Sholihin. Wajib taat terhadap pemimpin kaum muslimin selain dalam hal maksiat dan haram taat pada mereka dalam hal maksiat.

¹²⁶https://mizanstore.com/tafsir_al-misbah_edisi_2017_59750, diakses pada tanggal 20 Februari 2020, jam 8:00 wita.

¹²⁷M. Zacky Mubarak, M.A, Salma Hafizh, S.Hum, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik) Tanggung Jawab Sosial*, (Jakarta: P.T lentera Ilmu Marifat). hlm 119.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ « عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ »

“Dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat” (HR. Bukhari: 7144).¹²⁸

Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁹ Di dalam Undang- Undang lain dijelaskan Partai politik di atas senada dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Pasal 1 (1) adalah:

Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum, menjalankan aspirasi masyarakat yang adil dan amanah¹³⁰. Adapun tugas partai

¹²⁸Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhary, *Shahih al Jami' al al -Bukhary*, (Kairo: Maktabah al-Iman, 1423). hlm. 1427.

¹²⁹Sekretaris Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indomesia Tahun 1945*, (Jl. Jend.Gatot Subroto No.6 Jakarta, 2016). hlm. 167.

¹³⁰[https://www.academia.edu///makalah tentang ilmu politik](https://www.academia.edu///makalah_tentang_ilmu_politik), diakses pada tanggal 24 Desember 2019,jam 17.00 wita.

politik (1). Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat Pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambil menentukan keputusan politik, (2). Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu, terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas, (3). Berperan untuk memandu tuntutan-tuntutan masyarakat, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan masyarakat umum.¹³¹

Kajian terhadap Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur tersebut akan penulis memulai dari pemikiran yang dituangkan oleh Hasan Al Banna yang jelas menolak multipartai dalam agama Islam, beliau mengungkapkan partai itu berfokus pada suatu figur saja, bukan kepada jalan tujuan yang tidak jelas. Al Banna mempertegas dalam Pemikirannya pihak imperialis sengaja memisahkan dari beberapa tokoh, beliau mendorong orang-orang untuk bergabung dengan masing-masing tokoh, adapun mereka tidak bermaksud memecah belah tidak menghimpun kecuali pendusta belaka.¹³² Islam dalam konsteks Politik, pada umumnya mendukung dalam sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan asas tunggal.¹³³

¹³¹*Ibid*

¹³²Yusuf Al Qardhawy, *Min fiqhul Daulah Fil Islam*, Terjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustkaka Al-Kautsar, 1998). hlm .222.

¹³³Nanang Thaqiq (ed), *Paradigma Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). hlm. 67.

D. Analisis Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur

Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, juga terdapat dalam Undang- Undang lain dijelaskan Partai politik di atas senada dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Pasal 1 (1) adalah:

Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum, menjalankan aspirasi masyarakat yang adil dan amanah¹³⁴. Adapun tugas partai politik (1). Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat Pemerintahan sehingga dapat turut serta mengambil menentukan keputusan politik, (2). Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu, terhadap kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas, (3). Berperan untuk memandu tuntutan-tuntutan masyarakat, sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan masyarakat umum.

Maka dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002 menjelaskan tentang Pemikiran Politik H. Ma'wah Masykur yang

¹³⁴[https://www.academia.edu//makalah tentang ilmu politik](https://www.academia.edu//makalah_tentang_ilmu_politik), diakses pada tanggal 24 Desember 2019, jam 17.00 wita.

mana dua UU tersebut saling keterkaitan dengan pemikiran H. Ma'wah Masykur selama berkuasa di DPRD 50 tahun. Beliau tokoh politik yang taat kepada peraturan dan menjalankan panji-panji Islam dan Ahlussunnah Wal Jamaah. Tentu hal ini hasil dari usaha kerja keras yang ingin dicapai, maka usaha dan kerja keras serta pemikiran tekad yang kuat. Begitu juga H. Ma'wah Masykur, menurut Peneliti dalam menggapai usahanya menaklukan kekuasaan, ada dua faktor internal dan Faktor Eksternal, faktor internal Pemikirannya berupa, Islami, Santun, Responsif, Komunikatif, Bijaksana, Tegak, Supel, dan Demokratis. Sedang Faktor Eksternal Pemikirannya berupa idealisme NU, gagal Politik, kritikan, dan tokoh Politik sukses mengkader calon politisi. H. Ma'wah Masykur beliau merancang pemikiran yang sangat apik.

Hal ini dikarenakan ia ingin menerapkan Hukum-Hukum Islam, yang mana usaha awal beliau adalah memberikan misi kepada para bawahannya agar dapat merealisasikan hukum-hukum Islam Islam tersebut, dengan menanamkan spirit jiwa jihad Islam pada seorang yang dimaksud oleh panji itu. Beliau sangat mementingkan menitik berat bidang Politik sebagai satu kekuatan untuk melaksanakan hukum syariah Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara. Maka dengan cara tuntutan panduan hukum syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, umat Islam dapat mewujudkan Keadilan hakiki secara menyeluruh dan kesamarataan dalam kehidupan masyarakat. Beliau juga menekankan dinamisme hukum peradilan dan tugas perundangan yang merancang dan memperkuat kelembagaan dalam aspek negara Islam.

Dengan strategi yang mumpuni serta menguasai Sistem Politik, menghantarkan H. Ma'wah Masykur ke dalam suksesnya Kekuasaan Politik. Perlu diketahui, sebelum H. Ma'wah Masykur berkuasa, ada berbagai cara yang dilakukan beliau untuk mencapai kekuasaan politik, dan NU, GP Ansor mereka rangkul, tokoh masyarakat, Politisi untuk berlomba-lomba untuk menaklukkan hasil Politik tersebut dalam rentang waktu berbeda-beda. Oleh sebab itu, institusi pemerintah merupakan salah satu pondak tiang kokoh bagi seluruh Umat Islam dan Islam tidak membenarkan Negara dibiarkan tanpa memperhatikan nasib rakyatnya, dan Islam sangat menekankan disiplin dan ketertiban serta tidak membenarkan berlakunya anarkis yang diakibatkan oleh pemerintahan yang tidak berlaku adil. Perlu adanya sebagian orang berasumsi Pemikiran bahawa Islam tidak mempunyai kaitan dengan Politik adalah satu konsepsi yang salah yang muncul daripada orang-orang yang tidak memahami sumber pengetahuan Syariah Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, agama Islam sangat menolak keras keterkaitan antara Islam dan Politik menunjukkan ketidak sempurnaan imannya kepada agamanya.

Oleh karenanya beliau, menyatakan dengan jelas bahawa Keadilan masyarakat sejati hanya akan tercapai apabila melaksanakan Sistem Pemerintahan Islam. Lagi pula beliau berkata lagi, tugas ahli Politik Islam adalah lebih berat dibanding ahli Politik bukan Islam karena itu harus memperjuangkan, hak rakyat dan pembelaan secara menyeluruh tetapi yang lebih penting adalah mengajak rakyat kembali kepada jalan kebenaran, Sistem Politik Islam hendaklah berdasarkan Prinsip Musyawarah, maka musyawarah tersebut dapat menghapuskan unsur ketidak pahaman

dimasyarakat serta memberikan keadilan kepada masyarakat melalui demokratis tersebut. Menurut peneliti, jika seorang tokoh Politisi selalu keterbukaan diberbagai hal dalam aspek kegiatan pemerintahan maka masyarakat akan selalu percaya, oleh karenanya perlu adanya memahami konsteks musyawarah sesuai agama itu sendiri.

Beliau memiliki sisi militer GP Ansor yang sangat kuat, H. Ma'wah Masykur tidak mau usahanya gagal. Oleh karena itu, H. Ma'wah Masykur seorang kebijakan dari seluk beluk dengan mengetahui berbagai fakta yang ada dilapangan serta menggabungkan berbagai macam elemen seperti kekuatan. Adapun kelemahan adalah terjadinya penangkapan tokoh, yang mana ketika berniat ingin menggabungkan kedua kekuasaan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap langkah bersama antara Gabugnan Pemuda Ansor dan kekuasaan Politik tersebut. Adapun kekuatan yang dimiliki Gabungan Pemuda Ansor adalah memiliki segi militer GP Ansor yang sangat sulit di tandingi serta mempunyai pertahanan yang kokoh. Oleh karena itu, H. Ma'wah Masykur selalu pantau dan evaluasinya dengan menyiapkan persiapan untuk menaklukan Kekuasaan, dengan menyiapkan srategi tentang kekuasaan politik dan menyiapkan masa sesuai yang dibutuhkan, serta ia juga langsung andil untuk melihat seberapa jauh dan kokoh seluk-beluk pertahanan yang dimiliki, pemahaman yang mendalam aspek keislaman yang bersifat asas tentang pentingnya kehidupan masyarakat dan negara yang bertunjang sistem Islam sebagai satu sistem dalam semua elemen kehidupan manusia ditegaskan dalam agama Islam. Menurut peneliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi

pertahanan GP Ansor dan politik agar nantinya tidak terjadi kesimpangan dalam menyusun strategi.

Begitu juga ada mempunyai misi dan basic seorang guru, maka selanjutnya menyusun strategi, hal ini sangat dipenting dalam melaksanakan Politik. Terlihat H. Ma'wah Masykur menyiapkan persiapan awalnya untuk mengumpulkan gagasan di NU dan GP Ansor hal ini merupakan langkah awal dalam melakukan berpolitik, Yang mana H. Ma'wah Masykur mendekati seorang Ulama. Ulama ini adalah seorang tokoh agama yang bekerja sebagai penceramah, namun beliau tidak henti-henti bekerja keras, karena untuk mencapai kekuasaan politik sesuai Islam tujuannya dapat memenuhi kebutuhannya masyarakat. Oleh karena itulah tokoh guru juga bekerjasama dengan H. Ma'wah Masykur untuk membuat mengkader calon tokoh Politik. Disebutkan bahwa kaderan ini berhasil dicapai menjadi seorang Politisi. Peneliti berpendapat bahwa guru ini merupakan alat utama dalam menaklukan kekuasaan Politik. Terlihat H. Ma'wah Masykur menjalani proses pencapaian Politik dengan melakukan pengkaderan.

Tidak puas sampai disitu, H. Ma'wah Masykur ini tampaknya seorang tokoh santun kepada siapapun. Terlihat H. Ma'wah Masykur memang tokoh yang berbeda , H. Ma'wah Masykur mengadakan pertemuan bersama fraksi dan tokoh masyarakat, tetangga memiliki teguh berkonsentrasi pada satu pendirian saja. Akan tetapi perilaku santun tersebut dapat bertahan lama, dikarenakan akidah akhlak yang baik.

Perjuangan untuk menaklukan Kekuasaan Politik tidak semulus strategi yang di rancang, peneliti melihat kebijakan yang dilakukan beliau yang berusaha menorobos paksa dengan menabrakkan kebijakan Pemerintah sehingga menimbulkan terjadi penangkapan dia tentu di rugikan lebih umum Islam. Akhirnya H. Ma'wah Masykur berhasil bebas dari penangkapan tersebut oleh tentara. H. Ma'wah Masykur terus melontarkan resposif permasalahan dengan berkeyakinan bahwa kekuasaan ini sebentar akan berakhir jatuh, nampaknya H. Ma'wah Masykur berupaya untuk berusaha dengan cara yang baik, damai, cepat tanggap berbagai aspek yang ada, Politik dengan mendekati tokoh masyarakat dengan cara penyampaian tokoh Ulama dan memperjuangkan Islam sebagai teras dalam perjuangan Panji Islam.

H. Ma'wah Masykur Poltisi Teruji Oleh waktu lima tahun pengabdian menyatakan keberadaan Partai Politik dalam sebuah negara Islam namun partai tersebut memiliki Prinsip membangun Panji-Panji Islam di dalamnya sehingga didasarkan pada *ahlussunnah waljamaah* dalam agama Islam. H. Ma'wah Masykur adanya Partai Politik dalam Islam haru berperan penting. Menurut beliau Partai tersebut tidak harus simbol Islam akan tetapi niat mendirikan Panji-Panji Islam.¹³⁵ Partai Politik ataupun multipartai asalkan partai tersebut diibaratakan dengan mazhab- mazhab dalam kancah Perpolitikan sesuai agama, niat dalam hati mendirikan Panji-Panji Islam, tidak lain tidak bukan semata-mata berpolitik seseuai

¹³⁵*Ibid*, hlm. 52.

dengan tuntunan agama Islam. Agama mengajarkan segala aspek dalam kehidupan sehari-hari lebih spesifik Politik bertujuan mensejahterakan rakyat sekaligus menjalankan syariat Islam, mewujudkan Keadilan Sosial sesuai ajaran agama, banyak orang terjun dalam Politik tidak dilandasi dengan pengalaman sehingga terjadi ketimpangan sosial dimana.

Budaya Demokratis dan Damai sebagai pemimpin mendahulukan suara golongan maka timbul rasa kerja sama, mengayomi, mendengarkan aspirasi, ketika dalam masalah pertengkaran adu argumen maka pemimpin memberi jalan tengah, tidak menjatuhkan pendapat orang lain, dan yang terakhir saat memberi kritik maka wajib memberi solusi. Jujur dan bijaksana dalam Politik pemimpin harus mengutamakan kejujuran dari berbagai hal baik dalam segi perilaku, perbuatan, perkataan, materi, juga pemimpin merangkul mensukseskan didikan, bimbingan, dan mengayomi hingga berhasil. Rendah hati dan taat dalam berpolitik modal utama jati diri seseorang agar menjadi politisi yang disegani dan pandang masyarakat. Selain itu juga H. Ma'wah Masykur tokoh Politik sebagai penyejuk apabila terjadi perdebatan ketika rapat paripurna, beliau tokoh politik santun dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan.

Mengenai keberadaan Partai Politik H. Ma'wah Masykur mengatakan bahwa kutipan buku Demokrasi dalam cengkeraman Orde Baru yaitu, dalam perbuatan kebijakan publik baik legislatif maupun eksekutif tidak transparansi, penegakan hak asasi manusia sangat rendah, masyarakat sipil lemah tidak berdaya, Birokrasi pemerintah tidak berfungsi, presiden berkuasa otoriter, dan jabatan penting dalam

pemerintahan tidak terbuka, hal tersebut tidak sesuai dengan panji-panji Islam, sebab larangan dalam Islam harus ada Nash.

Pemikiran politik H. Ma'wah Masykur memang telah banyak menjadi pedoman bagi Politisi-Politisi di Kalimantan Selatan, baik mereka yang mengakui telah menggunakannya sebagai pedoman maupun mereka yang secara sembunyi-sembunyi bagi fraksi oposisi, dalam suasana Politik di Kalimantan Selatan pun telah banyak Politisi yang menggunakan strategi beliau. H. Ma'wah Masykur berkiprah dalam politik semenjak Orde Baru berkuasa tentu banyak kepahitan, berjuang di Partai Politik tidak di sokong kekuasaan, mendapatkan tekanan dari atas Partai Politik, ancaman dari Politisi, H. Ma'wah Masykur difitnah dan diculik dengan isu tertendensi Politik, Politik Islam keharusan H. Ma'wah Masykur modernisasi Politik Islam ini merupakan sikap yang harus dimulai sejak awal untuk menerapkan ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial dan Politik Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia, dalam Politik tersebut mewajibkan setiap Umat Islam untuk berpolitik sebagai sarana dakwah bagi umat Islam. Politik sebagai sarana Dakwah berarti aturan main Politik itu harus sesuai dengan aturan main dakwah. Oleh karena itu, berarti bahwa Politik tidak boleh menjauh dengan Allah dan menyesatkan pola pikir masyarakat.

Politik yang dijalankan seorang muslim yang berfungsi sebagai sarana Dakwah, melainkan politik yang penuh komitmen terhadap Allah. Ini juga berarti Politik bukan menjadi tujuan utama untuk mencari kekuasaan demi kekuasaan atau kepentingan demi kepentingan belaka. Kekuasaan, kepentingan, posisi, Politik, hanyalah menjadi

sarana atau tujuan antara untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya pengabdian Agama Islam dan kepada Allah Swt.

Pada Tahun 2009, persiapan berakhirnya Kekuasaan dalam Politik telah mencapai puncaknya di atas ujung tombak yang ada hanya perjuangan, bukti pengabdian, bukti pangkaderan, hak suara yang diperjuangkan, bahkan H. Ma'wah Masykur memberikan arahan, mengingatkan akan pentingnya jihad, berkorban, doa dan keikhlasan selalu dikenang. Setiap H. Ma'wah Masykur dia mengingatkan hal itu dan membangkitkan fanatisme dan semangat mereka berjuang dijalan Allah. Atas berkat strategi mereka lakukan, serta semangat jihad Islam menghantarkan ke pintu gerbang kemenangan.

E. Strategi Politik H. Ma'wah Masykur

Jenis strategi H. Ma'wah Masykur adalah strategi Panji Islam. Strategi Panji Islam adalah strategi Politik menjalankan segala aspek sesuai asas hukum Islam secara berbagai macam cara untuk hal ini menjadi ibadah gerak tingkah laku dalam kegiatan tersebut. dan langkah yang diambil sesuai dengan sasaran partai persatuan pembangunan. Terihat ketika beliau berjuang untuk berusaha mati-matian untuk menyelamatkan serta melindungi aspek Hukum Islam dengan segala taktik yang bersesuaian dengan pendapat orang lain. Dia juga tokoh Politik yang resposif dari berbagai permasalahan sehingga apapun aspirasi masyarakat maka dia langsung dibicarakan disaat rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selain itu

beliau selama berkecimpung dalam pemerintahan tidak pernah terpaut permasalahan terkait materi dan sebagainya.

Strategi konkret Politik H. Ma'wah Masykur yaitu:

1. Menerapkan prinsip sosial dimasyarakat baik tingkah laku maupun perbuatan saat bergaul dalam berpolitik
2. Memaksimalkan Majelis Ta'lim dalam masyarakat.
3. Peningkatan Pendidikan Politik secara komprehensif kepada masyarakat agar mengembangkan Budaya Politik.
4. Melaksanakan amanat Undang- Undang Dasar Negara RI 1945 sehingga sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa dan tetap menjaga persatuan Indonesia.
5. Mengutamakan upaya terpadu agar proses masyarakat kemiskinan berkurang.

Hal seperti ini sangat jelas ketika H. Ma'wah Masykur melakukan berbagai langkah-langkah untuk mencapai kekuasaan dalam menaklukkan memperjuangkan Pemikiran murni dari benak hati yang paling dalam dengan segala upaya yang ia lakukan. Beliau selalu berupaya untuk mencapai memperjuangkan Hukum-Hukum Islam sebagai alat pondasi memperkuat Sistem Politik sesuai asas partai persatuan pembangunan. Hal ini bukan tanpa tujuan perjuangan H. Ma'wah Masykur semata-mata ingin merealisasikan Hukum-Hukum Islam, bahwa ialah yang dimaksudkan dalam tokoh Politisi perlu diteladani bagi Calon Politisi tersebut.